



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Analysis of the Contribution of Motor Vehicle Tax to Increasing Locally-Generated Revenue in Central Sulawesi Province

Fadila Baharta¹, Andi Mattulada Amir², Nurhadi³

^{1,2,3}Universitas Abdul Azis Lamadjido

*Email Korespondensi: fadilabaharta03@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 11 May, 2026

Revised: 17 July, 2026

Accepted: 10 Aug, 2026

Kata Kunci:

Pajak Kendaraan Bermotor,
Pendapatan Asli Daerah,
Kontribusi, Efektivitas, Analisis
Tren

Keywords:

Motor Vehicle Tax, Locally-Generated Revenue, Contribution, Effectiveness, Trend Analysis

DOI: [10.56338/jks.v9i8.12422](https://doi.org/10.56338/jks.v9i8.12422)

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemandirian keuangan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi salah satu komponen pajak provinsi yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD seiring bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahun. Optimalisasi penerimaan PKB sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai perkembangan, efektivitas, dan kontribusi PKB dalam meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Tengah agar pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 sampai 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah. Teknik analisis data menggunakan rasio kontribusi, rasio efektivitas, dan analisis tren untuk melihat kecenderungan perkembangan penerimaan PKB dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selama periode 2019 – 2023 selalu melampaui target dengan tingkat efektivitas di atas 100% sehingga tergolong sangat efektif. Nilai realisasi PKB juga mengalami tren meningkat setiap tahun walaupun presentase capaian target sempat menurun pada tahun terakhir. Kontribusi PKB terhadap PAD berada pada kategori cukup baik hingga baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa PKB memiliki peran penting dalam peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Tengah. Temuan ini menegaskan perlunya pengelolaan dan pengawasan pajak yang berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan daerah.

ABSTRACT

Locally-Generated Revenue (PAD) is an indicator of regional financial independence derived from regional taxes and levies. Motor Vehicle Tax (PKB) is a provincial tax component with significant potential to boost PAD, given the annual increase in the number of vehicles. Optimizing PKB revenue is crucial for funding regional development. Therefore, it is necessary to analyze the trends, effectiveness, and contribution of PKB to PAD growth in Central Sulawesi Province so that the local government can formulate more appropriate policies.

This study aims to analyze the trends and contribution of Motor Vehicle Tax to the Locally-Generated Revenue of Central Sulawesi Province from 2019 to 2023. A qualitative method with a descriptive approach was employed. Secondary data obtained from the Central Sulawesi Province Regional Revenue Agency (BAPENDA) were used. Data analysis techniques included contribution ratios, effectiveness ratios, and trend analysis to observe the development of PKB revenue over the years.

The results indicate that realized Motor Vehicle Tax revenue consistently exceeded targets during the 2019–2023 period, with effectiveness levels exceeding 100%, classifying the performance as highly effective. PKB realization values showed an upward trend annually, although the percentage of target achievement declined slightly in the final year. The contribution of PKB to PAD ranged from "fairly good" to "good," leading to the conclusion that PKB plays a vital role in increasing PAD in Central Sulawesi Province. These findings underscore the need for sustainable tax management and oversight to maintain and enhance regional revenue.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah (PEMDA) memegang wewenang penuh dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) demi mewujudkan pembangunan yang merata. Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap warga Negara berkontribusi melalui pajak daerah guna mendukung progress pembangunan di wilayahnya. Dalam struktur provinsi, tiap kabupaten memiliki otonomi untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri dan fokus utama pada optimalisasi pelayanan public.

Sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah (Otonomi Daerah) dan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, yaitu mengenai pola pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemasukan daerahnya.

Pemasukan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, penerimaan dari dinas, bagi hasil pajak, pinjaman pemerintah, dan lainnya. Pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah. Pemasukan terbesar pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) didominasi oleh sektor pajak. Pajak tidak hanya dirasakan manfaatnya bagi kepentingan pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah.

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu, pajak tingkat provinsi dan pajak tingkat kabupaten/kota. Penerimaan daerah bersumber dari pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan alat berat, pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak pengambilan air bawah tanah, pajak pengambilan air permukaan, sisa kewajiban pokok perseroan terbatas, kompensasi penggunaan lahan, bagi hasil penjualan kayu, pajak penjualan atas barang mewah, pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPHTB).

Pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara sebagai akibat dari suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Ada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dipaksakan, tetapi tidak ada manfaat timbal balik dari negara untuk memelihara kesejahteraan umum S. I. Djajadiningrat (2012:1)

Kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui besaran sumbangan pajak tersebut terhadap pendapatan daerah, tetapi juga untuk memahami dinamika yang mempengaruhi penerimaan PKB. Dengan demikian hasil ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah 7/2023. Peraturan daerah (Perda) tersebut merupakan aturan pelaksana dari pasal 94 Undang-undang 1/2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD). Beleid tersebut juga dirilis untuk memperbarui peraturan pajak daerah agar sesuai dengan ketentuan terbaru. Salah satu jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pemprov palu menetapkan 2 tarif PKB dengan rinci yaitu 1% untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dan 0,5% untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, kegiatan sosial dan keagamaan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah desa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (BAPENDA) berikut laporan realisasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 244.884.823.890 Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah, Abd Wahab Hermain, mengungkapkan PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melampaui target. Dia merincikan PKB yang ditarget sebesar Rp. 225 miliar bisa terealisasi mencapai Rp. 244 miliar lebih atau 108%. tahun 2020 sebesar Rp.245.771.629.745 dari target Rp. 227.000.000.000 dengan presentase 108,27%, tahun 2021 sebesar Rp.269.269.106.813 dari target Rp. 234.000.000.000 dengan presentase 115,07%, tahun 2022 sebesar Rp.336.913.801.755 dari target Rp. 280.000.000.000 dengan presentase 120,33%, dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 342.123.239.844 dari target Rp. 312.500.000.000 dengan presentase 109,48%.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah. Teknik analisis data menggunakan rasio kontribusi, rasio efektivitas, dan analisis tren untuk melihat kecendrungan perkembangan penerimaan PKB dari tahun ke tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Kendaraan Bermotor Berkontribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 1. Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 – 2020

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	%	Selisih
1	2019	1.032.031.519.791,15	1.090.854.785.057,78	105,70	58.823.265.266,63
2	2020	1.054.606.448.582,08	1.122.670.398.589,07	106,45	68.063.950.006,99
3	2021	1.247.983.639.798,00	1.494.620.961.323,25	119,76	246.637.321.525,25
4	2022	1.561.939.035.510,00	1.559.706.290.296,45	99,86	(2.232.745.213,55)
5	2023	1.955.221.037.883,00	1.719.164.510.752,63	87,93	(236.056.527.130,37)

Sumber Data : BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel diatas merupakan tabel target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.090.854.785.057,78 dari target sebesar Rp. 1.032.031.519.791,15 atau sebesar 105,70 %. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp. 1.122.670.398.589,07 dari target sebesar Rp. 1.054.606.448.582,08 dan peningkatan persentase sebesar 106,45%. Kemudian, pada tahun 2021 persentase pendapatan asli daerah sebesar 119,76 %, namun pada tahun 2022 realisasi menurun sebesar Rp. 1.559.706.290.296,45 dari target Rp1.561.939.035.510,00. Dan pada tahun 2023 persentase pendapatan asli daerah kembali menurun sebesar 87,93 % dengan realisasi sebesar Rp. 1.719.164.510.752,63 dari target sebesar Rp. 1.955.221.037.883,00. Adapun target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Tabel 2. Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Tengah 2019 – 2023

No	Tahun	Target PKB	Realisasi PKB	%	Selisih
1	2019	225.000.000.000,00	244.884.823.890,00	108,84%	19.884.823.890,00
2	2020	227.000.000.000,00	245.771.629.745,00	108,27%	18.771.629.745,00
3	2021	234.000.000.000,00	269.269.106.813,00	115,07%	35.269.106.813,00
4	2022	280.000.000.000,00	336.913.807.755,00	120,33%	56.913.807.755,00
5	2023	312.500.000.000,00	342.141.827.744,00	109,49%	29.641.827.744,00

Tabel diatas merupakan tabel target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor lima tahun terakhir setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2019 realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 244.884.823.890,00 dari target sebesar Rp. 225.000.000.000,00 atau sebesar 108,84%. Pada tahun 2020 realisasi pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar Rp. 245.771.629.745,00 dari target sebesar Rp.227.000.000.000,00 atau sebesar 108,27%. Kemudian, pada tahun 2021 presentase pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 115,07% dengan realisasi Rp. 269.269.106.813,00 dari target Rp. 234.000.000.000,00. Pada tahun 2022 presentase pajak kendaraan bermotor sebesar 120,33% dengan realisasi Rp. 336.913.807.755,00 dari target Rp. 280.000.000.000,00. Pada tahun 2023 persentase pajak kendaraan bermotor menurun sebesar 109,49%, namun realisasi tetap meningkat sehingga mencapai sebesar Rp. 342.141.827.744,00 dari target sebesar Rp. 312.500.000.000,00.

Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor

Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan formulasi :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

1. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{244.884.823.890,00}{1.090.854.785.057,78} \times 100 \% \\ &= 22,44\% \end{aligned}$$

2. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{245.771.629.745,00}{1.122.670.398.589,07} \times 100 \% \\ &= 21,89\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{269.269.106.813,00}{1.494.620.961.323,25} \times 100 \% \\ &= 18,01\% \end{aligned}$$

4. Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{336.913.807.755,00}{1.559.706.290.296,45} \times 100 \% \\ &= 21,60\% \end{aligned}$$

5. Tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{342.141.827.744,00}{1.719.164.510.752,63} \times 100 \% \\ &= 19,90\% \end{aligned}$$

(Handoko, 2013 : 3) Perhitungan kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Dari hasil perhitungan kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Tengah diatas ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 – 2023

Tahun	Realisasi PKB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2019	244.884.823.890,00	1.090.854.785.057,78	22,44%	Sedang
2020	245.771.629.745,00	1.122.670.398.589,07	21,89%	Sedang
2021	269.269.106.813,00	1.494.620.961.323,25	18,01%	Kurang
2022	336.913.807.755,00	1.559.706.290.296,45	21,60%	Sedang
2023	342.141.827.744,00	1.719.164.510.752,63	19,90%	Kurang
Rata-Rata			20,76%	Sedang

Sumber : Hasil data olahan

Keterangan :

- 50 % : Sangat Baik
- 40,10% - 50% : Baik
- 30,10% - 40% : Cukup Baik
- 20,10 % - 30% : Sedang
- 10,10% - 20% : Kurang
- 0,00% - 10% : Sangat Kurang

Mengukur kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), skala pengukuran yang digunakan yaitu dari 50% terkontribusi sangat baik. Berdasarkan tabel kontribusi, secara keseluruhan rata-rata kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam lima tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah 20,76%. Pada tahun 2019 tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 22,44%, berdasarkan kriteria dari kontribusi persentase dapat dikatakan terkontribusi sedang karena tingkat persentasenya 20%-30%.

Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar 18,01% - 21,89% dengan nilai presentase 10% - 30% dikarenakan terjadi pandemi COVID – 19 yang membuat ekonomi daerah menurun drastis termasuk dalam sektor pajak kendaraan bermotor. Namun pada Tahun 2022 tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 21,60%, dan dikategorikan terkontribusi sedang dengan persentase 20%-30%. Pada Tahun 2023 tingkat kontribusi kembali mengalami penurunan dengan persentasenya 19,90%, dikategorikan terkontribusi kurang dengan tingkat persentase kontribusi 10%- 20%. Angka tersebut menggambarkan bahwa Pajak

Kendaraan Bermotor sedang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data diatas, maka disimpulkan bahwa tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yang sedang, sebab rata-rata pertahun tingkat persentasenya 20%-30% yang sesuai dengan kriteria kontribusi pajak kendaraan bermotor.

Menurut Bapak Rian Darmawan selaku Kasubid Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan bahwa “ Pajak kendaraan bermotor (PKB) memberikan kontribusi terhadap PAD. Peningkatan dari segi PKB memberikan kontribusi bukan hanya untuk provinsi, tetapi juga untuk kabupaten atau kota, karena ada bagi hasil dari PKB. Justru itu kenapa PKB menjadi kontribusi, supaya pelayanan bagus dan terdeteksi semua PKB masyarakat dari objek pajak yang ada di kabupaten atau kota, maka ada UPT kabupaten dan kota untuk mengawal PKB tersebut karena kontribusinya ini sangat besar”.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melalui program sosialisasi, kampanye sadar pajak, dan edukasi publik. Selain itu, kemudahan layanan pembayaran pajak dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi pembayaran online, QRIS, dan kerja sama dengan lembaga perbankan maupun gerai ritel. Pendataan ulang objek pajak juga perlu dilakukan secara berkala untuk meminimalisir potensi penerimaan yang hilang, disertai dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar.

Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang secara khusus adalah pajak kendaraan bermotor lebih ditingkat kembali. Oleh sebab itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui berbagai upaya mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

Menurut bapak Melki Sampe selaku Staf Pengembangan dan Penetapan Pendapatan BAPENDA Prov.Sulawesi Tengah mengungkapkan bahwa "Dalam mengotimalkan pajak kendaraan bermotor, maka upaya yang dilakukan BAPENDA dengan memberikan kemudahan dalam membayar pajak, menghimbau kepada wajib pajak untuk taat membayar pajak agar wajib pajak mengetahui manfaat membayar pajak guna membangun dan kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, serta melaksanakan Samsat keliling dan penegak hukum bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak".

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk mengetahui seberapa efektif Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan formulasi :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 1. \text{ Tahun 2019 : Efektivitas} &= \frac{244.884.823.890,00}{225.000.000.000,00} \times 100\% \\ &= 108,83\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{ Tahun 2020 : Efektivitas} &= \frac{245.771.629.745,00}{227.000.000.000,00} \times 100\% \\ &= 108,26\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ Tahun 2021 : Efektivitas} &= \frac{269.269.106.813,00}{234.000.000.000,00} \times 100\% \\ &= 115,07\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \text{ Tahun 2022 : Efektivitas} &= \frac{336.913.807.775,00}{280.000.000.000,00} \times 100\% \\ &= 120,32\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \text{ Tahun 2023 : Efektivitas} &= \frac{342.141.827.744,00}{312.500.000.000,00} \times 100\% \\ &= 109,48\% \end{aligned}$$

Tabel 4. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 – 2023

Tahun	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2019	225.000.000.000,00	244.884.823.890,00	108,83%	Sangat Efektif
2020	227.000.000.000,00	245.771.629.745,00	108,26%	Sangat Efektif
2021	234.000.000.000,00	269.269.106.813,00	115,07%	Sangat Efektif
2022	280.000.000.000,00	336.913.807.755,00	120,32%	Sangat Efektif
2023	312.500.000.000,00	342.141.827.744,00	109,48%	Sangat Efektif
Rata-rata			112,39%	Sangat Efektif

Sumber : Hasil data olahan

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2019 – 2023. Diperoleh nilai rata – rata sebesar 112,39%. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB setiap tahunnya secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pencapaian ini dapat dikategorikan sangat efektif, karena menurut kriteria efektivitas, nilai lebih dari 100% menandakan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mampu memenuhi target yang direncanakan, tetapi juga berhasil mengoptimalkan potensi penerimaan pajak di luar estimasi awal. Hal ini mencerminkan adanya kinerja yang baik dari perangkat daerah yang bertanggung jawab, khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dalam menggali potensi pajak kendaraan bermotor.

Dengan demikian, rata – rata efektivitas 112,39% selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor PKB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang stabil dan dapat diandalkan. Pencapaian ini bukan hanya memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi pajak secara profesional dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Penerimaan pajak atas kendaraan bermotor tahun 2019-2023 dari tahun ke tahun menunjukkan kriteria rata- rata sebesar 112,39% dan dinilai sangat efektif.

Analisis Tren Perkembangan**1. Tahun 2020**

$$\begin{aligned}\text{Tren} &= \frac{P_0 - P_1}{P_1} \times 100 \% \\ &= \frac{245.771.629.745,00 - 244.884.823.890,00}{244.884.823.890,00} \times 100\% \\ &= 2,45\%\end{aligned}$$

1. Tahun 2021

$$\begin{aligned}&= \frac{269.269.106.813,00 - 245.771.629.745,00}{245.771.629.745,00} \times 100\% \\ &= 2,69\%\end{aligned}$$

2. Tahun 2022

$$\begin{aligned}&= \frac{336.913.807.755,00 - 269.269.106.813,00}{269.269.106.813,00} \times 100\% \\ &= 3,36\%\end{aligned}$$

3. Tahun 2023

$$\begin{aligned}&= \frac{342.141.827.744,00 - 336.913.807.755,00}{336.913.807.755,00} \times 100\% \\ &= 3,42 \%\end{aligned}$$

Untuk mengetahui perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023, perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus:

Dari hasil perhitungan analisis tren perkembangan pajak kendaraan bermotor provinsi Sulawesi Tengah diatas ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 – 2023

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	Perkembangan
2019	244.884.823.890,00	-
2020	245.771.629.745,00	2,45%
2021	269.269.106.813,00	2,69%
2022	336.913.807.755,00	3,36%
2023	342.141.827.744,00	3,42%

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 hingga 2023 perkembangan Pajak Kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Realisasi pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari data yang diperoleh dikantor BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah. Ungkap Rian Darmawan selaku Kasubid Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan “Dari data peningkatan PKB dilihat apakah dari dealer atau dari mana meningkatnya kendaraan bermotor, otomatis dengan peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan roda dua maupun roda empat dan alat – alat kendaraan berat lainnya secara otomatis pendapatan pajak dari mereka menjadi meningkat”. Peningkatan jumlah kendaraan ini di dorong oleh keadaan ekonomi masyarakat yang sedang baik, dimana masyarakat memiliki cukup uang lebih untuk membeli kendaraan baru walau terkadang sudah memiliki kendaraan. Dalam sebuah organisasi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintahan setiap program kerja yang dilaksanakan seringkali menemui berbagai kendala hal ini juga terjadi dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh BAPENDA Provinsi Sulawesi tengah melalui kantor Samsat berada di Kabupaten/Kota. Menurut bapak Rian Darmawan selaku Kasubid Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan bahwa “Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, kemudian ada juga alamat 2 (dua) nama yang berbeda dalam server Samsat. Ada juga dalam melakukan sosialisasi untuk menghimbau wajib pajak masih terkendala jarak dan kekurangan personil Samsat”. Peningkatan dari jumlah kendaraan ini akan meningkatkan juga kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor dari Tahun 2019 sampai 2020 sebesar 2,45%. Tahun 2020 sampai 2021 perkembangan Pajak

Kendaraan Bermotor meningkat menjadi 2,69%. Tahun 2021 sampai 2022 perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan sebesar 3,36%. Pada tahun 2022 sampai 2023 perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor kembali mengalami peningkatan menjadi 3,42%.

Hasil analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor diperoleh dari pembagian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan realisasi Pendapatan Asli Daerah kemudian dikalikan dengan seratus persen. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan perhitungan dari tabel analisis kontribusi. Rata-rata persentase kontribusi dalam lima tahun

terakhir dari tahun 2019-2023 sebesar 20,76% termasuk dalam kategori sedang karena tingkat persentasenya 20%-30%. Tercatat cukup tinggi pada tahun 2019 dengan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagian besar pendapatan ini digunakan untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2020 meskipun terjadi penurunan dalam pendapatan pajak kendaraan bermotor akibat kebijakan relaksasi, kontribusi PKB dalam meningkatkan PAD tetap terlihat stabil. Kemudian pada tahun 2021 dengan pemulihan ekonomi kontribusi PKB dalam

meningkatkan PAD mulai kembali meningkat. Implementasi pembayaran pajak yang lebih muda melalui sistem digital juga mempercepat proses pemungutan pajak. Tahun 2022 kontribusi PKB mencapai angka yang lebih tinggi, seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak. Pada tahun 2023 PKB memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Tengah.

Tingkat keefektifitas dapat diperoleh dari pembagian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Target Pajak Kendaraan Bermotor kemudian dikalikan dengan seratus persen. Hasil rata-rata tingkat efektivitas dilihat dari lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023 sebesar 112,39% dinilai sangat efektif karena tingkat persentasenya diatas 100%.

Analisis tren perkembangan dalam lima tahun terakhir mulai dari tahun 2019- 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif, dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah daerah. Pada tahun 2019, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian tarif pajak serta program intensifikasi pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Tahun 2020 pandemi COVID-19 yang melanda global mempengaruhi ekonomi daerah, termasuk dalam sektor pajak kendaraan bermotor. Akibatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor sempat mengalami penurunan, meskipun upaya pemulihan dilakukan pada akhir tahun. Tahun 2021 meskipun pandemi COVID-19 masih berlanjut, ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pemerintah daerah kembali melaksanakan program digitalisasi dalam proses pembayaran pajak, yang mempermudah wajib pajak dan meningkatkan efesiensi pemungutan. Hal ini menyebabkan sedikit pemulihan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2022 menunjukkan tren positif bagi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah. Peningkatan jumlah kendaraan baru yang terdaftar dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2023, dengan implementasi kebijakan yang lebih terstruktur dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor mencapai puncaknya dalam lima tahun terakhir. Pemerintah daerah juga semakin gencar melakukan sosialisasi dan meningkatkan pengawasan agar penerimaan pajak dapat dimaksimalkan.

Dapat disimpulkan bahwa Perkembangan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang positif, meskipun sempat terdampak oleh pandemi COVID-19. Penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mengalami pemulihan dan bahkan mencatatkan angka yang signifikan pada tahun 2023. Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Tengah, yang digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang tepat dan sistem pemungutan yang lebih efisien, diharapkan kontribusi pajak kendaraan bermotor akan terus meningkat di masa depan.

KESIMPULAN

Rata-rata kontribusi Pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sedang dengan rata-rata persentase yang diperoleh sebesar 20,76%. Terlihat pada tahun 2019 tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 22,44%, berdasarkan kriteria dari kontribusi persentase dapat dikatakan berkontribusi sedang karena tingkat persentasenya 20%-30%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 21,89%, namun tingkat kontribusi dikategorikan sedang karena tingkat persentase 20%-30%. Pada tahun 2021 tingkat kontribusi kembali mengalami penurunan dengan persentasenya 18,01%, dikategorikan berkontribusi kurang dengan tingkat persentase kontribusi 10%-20%. Tahun 2022 tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 21,60%, dan dikategorikan berkontribusi sedang dengan persentase 20%-30%. Tahun 2023 tingkat kontribusi kembali mengalami penurunan dengan persentasenya 19,90%, dikategorikan berkontribusi kurang dengan tingkat persentase kontribusi 10%-20%. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi yang

dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi, pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, berkat perbaikan dalam sistem administrasi, digitalisasi, dan kesadaran masyarakat.

Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah bisa dikatakan sangat efektif, dengan perolehan rata-rata persentase sebesar 112,39% . Hal tersebut dikarenakan target pemungutan pajak kendaraan bermotor seluruhnya telah melewati target. Terlihat pada tahun 2019 efektivitas sistem pajak kendaraan bermotor masih tergolong cukup baik meskipun ada beberapa tantangan dalam hal administrasi dan kepatuhan pajak dengan persentase sebesar 108,83% dinilai sangat efektif, pada tahun 2020 sempat menurun akibat dampak COVID-19 yang mengurangi daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan dengan persentase 108,26% tergolong sangat efektif, tahun 2021 efektivitas pajak kendaraan bermotor kembali membaik, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan persentase sebesar 115,07% dinilai sangat efektif, pada tahun 2022 peningkatan yang signifikan dalam efektivitas pajak kendaraan bermotor dengan persentase sebesar 120,32% dinilai sangat efektif, pada tahun 2023 efektivitas pajak kendaraan bermotor menurun dari tahun sebelumnya dengan persentase 109,48% dikategorikan sangat efektif.

Hasil analisis tren perkembangan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah, mengalami peningkatan secara terus menerus selama periode pengamatan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah daerah seperti menjalankan program intensifikasi pemungutan pajak dan menjalankan program digitalisasi dalam proses pembayaran pajak, yang mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Karina, N., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Kusuma, (2021). Pajak Kendaraan Bermotor. BAPENDA - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Muchtar, M., Abdullah, M. F., & Susilowati, D. (2017). Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Barito Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(3), 385-399.
- Niayah, N., & Danisya, D. (2022). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(6), 731-736.
- Ningsih, B. A., Romli, H., & Putri, A.U. (2021). Analisis Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2019. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(1), 44-50. <https://doi.org/10.47747/jbme.v2i1.420>
- Noviana Wulandari. (2023). Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 84-91.
- Rompis, N. E., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta Tambuala, M. F. H. (2020). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah) (Doctoral dissertation, IAIN Palu).
- Wulandari, N. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021. DSpace UII, 45119. 71